

# LITERASI DIGITAL DAN PEMBENTUKAN KESIAPAN ASN DIGITAL: PERAN MEDIASI PENERIMAAN TEKNOLOGI PADA MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK

Nico Pranata Mulya<sup>1</sup>, Nindi Riyan Gustin<sup>2</sup>, Frans Dika Permana<sup>3</sup>, Nida Silvia  
Lestari<sup>4</sup>

STABN Sriwijaya, Banten, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Pamulang, Banten, Indonesia<sup>2,4</sup>

Universitas Andalas, Padang, Indonesia<sup>3</sup>

Dikirim (Februari 26, 2026)  
Direvisi (April 06, 2026)  
Diterima (April 09, 2026)  
Diterbitkan (April 30, 2026)

Corresponding Author  
[Dosen03224@unpam.ac.id](mailto:Dosen03224@unpam.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi digital terhadap kesiapan menjadi ASN digital dengan *technology acceptance* sebagai variabel mediasi. Sampel penelitian terdiri dari 150 mahasiswa Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang Kampus Serang. Analisis data menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menjadi ASN digital ( $\beta=0,346$ ,  $p<0,05$ ). Literasi digital juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *technology acceptance* ( $\beta=0,667$ ,  $p<0,05$ ). *Technology acceptance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menjadi ASN digital ( $\beta=0,423$ ,  $p<0,05$ ). Hasil uji mediasi menunjukkan *technology acceptance* memediasi secara parsial pengaruh literasi digital terhadap kesiapan menjadi ASN digital ( $\beta=0,282$ ,  $p<0,05$ ). Model penelitian mampu menjelaskan 49,4% varians kesiapan menjadi ASN digital. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dalam mempersiapkan lulusan menghadapi transformasi digital pemerintahan.

**Kata Kunci:** *Literasi digital; Kesiapan digital; Tenaga kerja sektor publik; Pemerintahan digital; Model Penerimaan Teknologi (TAM).*

## ABSTRACT

This study aims to examine the effect of digital literacy on digital readiness among prospective civil servants, with *technology acceptance* serving as a mediating variable. The sample consisted of 150 undergraduate students enrolled in the Public Administration program at Universitas Pamulang, Serang Campus. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS

4.0 software. The results indicate that digital literacy has a positive and significant effect on digital readiness among prospective civil servants ( $\beta = 0.346$ ,  $p < 0.05$ ). Digital literacy also significantly influences technology acceptance ( $\beta = 0.667$ ,  $p < 0.05$ ), while technology acceptance positively and significantly affects digital readiness ( $\beta = 0.423$ ,  $p < 0.05$ ). Mediation analysis reveals that technology acceptance partially mediates the relationship between digital literacy and digital readiness ( $\beta = 0.282$ ,  $p < 0.05$ ). The proposed model explains 49.4% of the variance in digital readiness. These findings contribute to the literature by integrating the Digital Competence Framework and the Technology Acceptance Model to explain individual-level digital readiness in the public sector context. Practically, the study provides insights for higher education institutions in designing curricula that strengthen digital competencies and foster positive attitudes toward technology to prepare graduates for digital government transformation.

**Key Word:** *Digital literacy; Digital readiness; Public sector workforce; Digital government; Technology Acceptance Model (TAM).*

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menuntut aparatur sipil negara (ASN) memiliki kompetensi digital yang memadai untuk mengoperasikan berbagai sistem informasi pemerintahan. Perubahan paradigma pelayanan publik dari model konvensional menuju digital *governance* mengharuskan aparatur tidak hanya memahami substansi kebijakan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi sebagai instrumen utama pelayanan publik.

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan masih terdapat kesenjangan kompetensi digital di lingkungan birokrasi Indonesia. Hasil kajian Silitonga (2023) mengindikasikan bahwa sebagian besar ASN masih berada pada tingkat literasi digital dasar, sehingga belum optimal dalam mendukung implementasi SPBE. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan individu aparatur dalam menerima dan memanfaatkan teknologi.

Literasi digital dipahami sebagai kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, serta memproduksi informasi melalui teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. *Kerangka Digital Competence Framework (DigComp)* mengidentifikasi lima dimensi utama kompetensi digital, yaitu *information*

and data literacy, communication and collaboration, digital content creation, safety, dan problem solving. Kompetensi tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk kesiapan individu menghadapi lingkungan kerja berbasis teknologi.

Di sisi lain, *Technology Acceptance Model (TAM)* menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks birokrasi digital, sikap terhadap teknologi berpotensi menjadi mekanisme psikologis yang menjembatani kompetensi digital dengan kesiapan kerja berbasis teknologi. Artinya, literasi digital yang tinggi belum tentu secara otomatis menghasilkan kesiapan digital apabila tidak disertai dengan penerimaan teknologi yang positif.

Penelitian terdahulu mengenai literasi digital dan kesiapan kerja umumnya berfokus pada sektor swasta atau konteks pendidikan umum. Sementara itu, studi mengenai digital readiness di sektor publik cenderung menekankan aspek struktural dan kelembagaan, seperti kematangan digital pemerintah atau kapasitas organisasi, tanpa menguji mekanisme perilaku individu yang mendasarinya. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait bagaimana literasi digital berkontribusi terhadap kesiapan ASN digital melalui mekanisme penerimaan teknologi pada level individu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi digital terhadap kesiapan menjadi ASN digital dengan *technology acceptance* sebagai variabel mediasi pada mahasiswa Program Studi Administrasi Negara. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model kesiapan ASN digital berbasis kompetensi dan perilaku teknologi, serta kontribusi praktis bagi penguatan kurikulum pendidikan tinggi dalam mempersiapkan calon aparatur menghadapi transformasi digital pemerintahan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Literasi Digital**

Literasi digital merupakan kompetensi *multidimensional* yang mencakup kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, memproduksi, serta mengomunikasikan informasi melalui teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Kerangka *Digital Competence Framework (DigComp 2.2)* yang dikembangkan oleh Vuorikari, Kluzer, dan Punie (2022) mengidentifikasi lima domain utama kompetensi *digital*, yaitu *information and data literacy, communication and collaboration, digital content creation, safety, serta problem solving*. Kerangka ini banyak digunakan sebagai referensi pengukuran kompetensi digital pada level individu di berbagai negara.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa literasi digital berperan signifikan dalam meningkatkan kesiapan kerja dan *employability* mahasiswa di era ekonomi digital. Potgieter, Coetzee, dan Ferreira (2023) menemukan bahwa literasi digital berpengaruh langsung terhadap *work readiness* mahasiswa universitas di Afrika Selatan. Temuan serupa dikemukakan oleh Khan et al. (2022), yang menunjukkan bahwa kompetensi *digital* merupakan determinan utama kesiapan tenaga kerja abad ke-21.

Dalam konteks pendidikan, literasi digital juga berhubungan dengan keyakinan individu dalam menggunakan teknologi serta sikap terhadap inovasi digital (Antonietti, Cattaneo, & Amenduni, 2022). Artinya, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga membentuk kesiapan kognitif dan afektif dalam menghadapi lingkungan kerja berbasis teknologi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada sektor swasta atau konteks pendidikan umum, sehingga belum secara spesifik menguji implikasinya dalam sektor publik yang memiliki karakteristik regulatif dan birokratis yang berbeda.

#### ***Technology Acceptance Model (TAM)***

*Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Kedua persepsi tersebut membentuk sikap serta intensi individu dalam menggunakan teknologi.

Model TAM telah divalidasi secara luas dalam berbagai konteks organisasi dan pendidikan. Yang dan Lou (2024) menunjukkan bahwa *self-efficacy digital* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan teknologi melalui peningkatan persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Dalam konteks organisasi korporasi, Khoza, Mabitsela, dan Nel (2024) menemukan bahwa *technology acceptance* memediasi hubungan antara *technology readiness* dan *work engagement*.

Meskipun demikian, aplikasi TAM dalam konteks birokrasi publik relatif masih terbatas. Studi mengenai transformasi digital pemerintahan cenderung berfokus pada kesiapan organisasi atau kematangan sistem digital (OECD, 2023), bukan pada mekanisme psikologis individu dalam menerima teknologi. Padahal, dalam lingkungan birokrasi yang sarat regulasi, penerimaan teknologi oleh individu aparatur dapat menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

#### **Kesiapan ASN Digital dalam Konteks Sektor Publik**

Konsep kesiapan digital dalam sektor publik umumnya dikaitkan dengan kapasitas organisasi dalam mengadopsi teknologi dan menyediakan layanan digital

kepada masyarakat. OECD (2023) menekankan pentingnya digital government maturity sebagai indikator kesiapan institusional, sementara UNDP (2022) mengembangkan kerangka *digital public workforce capability* yang menyoroti kebutuhan kompetensi aparatur dalam mendukung transformasi digital.

Namun, pendekatan tersebut lebih bersifat struktural dan institusional, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan kesiapan pada level individu. Dalam konteks Indonesia, Silitonga (2023) menunjukkan masih terdapat kesenjangan keterampilan digital di kalangan ASN, yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi SPBE. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan ASN digital tidak hanya bergantung pada kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga pada kompetensi serta sikap individu terhadap teknologi.

Dengan demikian, kesiapan ASN digital dalam penelitian ini dipahami sebagai kesiapan individu calon aparatur dalam memahami regulasi transformasi digital, menguasai sistem pemerintahan berbasis elektronik, beradaptasi dengan teknologi, serta menjunjung etika digital pelayanan publik.

### **Integrasi Konseptual dan Pengembangan Hipotesis**

Literatur menunjukkan bahwa literasi digital berkontribusi terhadap kesiapan kerja melalui peningkatan kompetensi teknis dan kognitif (Potgieter et al., 2023; Khan et al., 2022). Dalam kerangka TAM, kompetensi digital berpotensi membentuk persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan teknologi (Yang & Lou, 2024), yang pada akhirnya memengaruhi kesiapan individu dalam menggunakan teknologi di lingkungan kerja.

Berdasarkan sintesis tersebut, literasi digital diperkirakan memiliki pengaruh langsung terhadap kesiapan ASN digital. Individu dengan tingkat literasi digital tinggi cenderung lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan berbasis teknologi.

#### **H1: Literasi digital berpengaruh positif terhadap kesiapan ASN digital.**

Selain itu, literasi digital diperkirakan meningkatkan penerimaan teknologi karena individu yang kompeten secara digital lebih percaya diri dalam memanfaatkan sistem teknologi.

#### **H2: Literasi digital berpengaruh positif terhadap *technology acceptance*.**

Selanjutnya, penerimaan teknologi diperkirakan berkontribusi terhadap kesiapan ASN digital, karena sikap positif terhadap teknologi mendorong intensi penggunaan dalam konteks pekerjaan berbasis digital.

#### **H3: *Technology acceptance* berpengaruh positif terhadap kesiapan ASN digital.**

Akhirnya, berdasarkan model mediasi dalam literatur perilaku organisasi (Zhao, Lynch, & Chen, 2010), *technology acceptance* diperkirakan memediasi hubungan antara literasi digital dan kesiapan ASN digital.

**H4: *Technology acceptance* memediasi pengaruh literasi digital terhadap kesiapan ASN digital.**

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional untuk menguji hubungan kausal antara literasi digital, *technology acceptance*, dan kesiapan ASN digital. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang Kampus Serang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive* sampling dengan kriteria mahasiswa minimal semester 3 dan memiliki pengalaman menggunakan sistem informasi akademik atau aplikasi digital dalam aktivitas perkuliahan. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 150 responden, yang telah memenuhi ketentuan minimum analisis *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), yaitu sepuluh kali jumlah jalur struktural terbesar yang menuju konstruk endogen dalam model (Hair et al., 2019).

Instrumen penelitian berupa *kuesioner* terstruktur menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Seluruh konstruk diperlakukan sebagai konstruk reflektif. Variabel literasi digital diukur dengan mengadaptasi indikator dari *Digital Competence Framework (DigComp 2.2)* yang mencakup dimensi pengelolaan informasi, komunikasi digital, pembuatan konten digital, keamanan digital, dan pemecahan masalah (Vuorikari et al., 2022). Variabel *technology acceptance* diukur berdasarkan konstruk *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), yang meliputi *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan *behavioral intention*. Adapun variabel kesiapan ASN digital dikembangkan dengan merujuk pada regulasi pengelolaan kinerja ASN serta tuntutan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mencakup pemahaman regulasi transformasi digital, penguasaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, adaptabilitas terhadap teknologi, serta etika digital pelayanan publik.

Analisis data dilakukan menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Metode ini dipilih karena sesuai untuk penelitian yang bersifat prediktif, mampu mengakomodasi konstruk laten reflektif, serta toleran terhadap data yang tidak berdistribusi normal (Hair et al., 2019; Shmueli et al., 2019). Evaluasi model dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengujian model pengukuran dan model struktural. Model

pengukuran dievaluasi melalui *convergent validity* (*outer loading* > 0,70 dan AVE > 0,50), *reliabilitas internal* (*Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* > 0,70), serta *discriminant validity* menggunakan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT < 0,90). Model struktural dievaluasi melalui nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), signifikansi koefisien jalur dengan teknik *bootstrapping*, serta pengujian *specific indirect effects* untuk menguji peran mediasi. Kriteria pengujian hipotesis menggunakan nilai *T-statistics* > 1,96 dan *p-value* < 0,05, dengan penentuan tipe mediasi mengacu pada pendekatan Zhao, Lynch, dan Chen (2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis

#### Karakteristik Responden

Responden penelitian berjumlah 150 mahasiswa Program Studi Administrasi Negara. Komposisi responden terdiri atas 45% laki-laki dan 55% perempuan. Berdasarkan semester, responden tersebar pada semester 3 (33%), semester 5 (35%), dan semester 7 (32%). Seluruh responden memiliki pengalaman menggunakan sistem informasi akademik dan berbagai aplikasi digital dalam kegiatan perkuliahan.

#### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Hasil evaluasi reliabilitas dan validitas konstruk disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas dan *Convergent Validity***

Konstruk	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	AVE	Keterangan
Literasi Digital	0,781	0,851	0,533	Valid & Reliabel
<i>Technology Acceptance</i>	0,771	0,845	0,521	Valid & Reliabel
Kesiapan ASN Digital	0,614	0,795	0,564	Reliabel (CR > 0,70)

Seluruh konstruk memiliki nilai *Composite Reliability* di atas 0,70 dan AVE di atas 0,50, sehingga memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen. Pada konstruk Kesiapan ASN Digital, evaluasi *outer loading* menunjukkan bahwa tiga indikator pertama (KA1 = 0,78, KA2 = 0,80, KA3 = 0,76) memiliki kontribusi kuat terhadap konstruk. Indikator keempat (KA4 = 0,62) menunjukkan kontribusi lebih rendah, namun masih melampaui ambang batas 0,40 yang disyaratkan dalam PLS-SEM sehingga tetap dipertahankan (Hair et al., 2019). Rendahnya nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,614 pada konstruk ini dapat dijelaskan melalui dua faktor teknis.

Pertama, Alpha sangat sensitif terhadap jumlah indikator. Konstruk dengan jumlah indikator sedikit secara struktural menghasilkan Alpha lebih rendah meskipun reliabilitasnya memadai (Mohd Dzin & Lay, 2021). Kedua, dalam pendekatan PLS-SEM, *Composite Reliability* merupakan ukuran reliabilitas yang lebih tepat dibandingkan Alpha karena mempertimbangkan bobot *outer loading* secara proporsional, bukan mengasumsikan kontribusi yang sama pada setiap indikator (Hair et al., 2019). Dengan nilai *Composite Reliability* sebesar 0,795 dan AVE sebesar 0,564, konstruk Kesiapan ASN Digital dinyatakan reliabel dan valid secara konvergen.

Pengujian validitas diskriminan menggunakan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) ditampilkan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji *Discriminant Validity* (HTMT)**

Konstruk	LD	TA	KA
<b>Literasi Digital (LD)</b>	-		
<b><i>Technology Acceptance</i> (TA)</b>	0,667	-	
<b>Kesiapan ASN Digital (KA)</b>	0,628	0,654	-

Seluruh nilai HTMT berada di bawah 0,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas diskriminan yang memadai.

### **Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)**

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Variabel Endogen	$R^2$	Interpretasi
<b><i>Technology Acceptance</i></b>	0,445	Moderat
<b>Kesiapan ASN Digital</b>	0,494	Moderat

Nilai  $R^2$  sebesar 0,445 menunjukkan bahwa literasi digital mampu menjelaskan 44,5% *varians technology acceptance*. Sementara itu, literasi digital dan *technology acceptance* secara simultan mampu menjelaskan 49,4% *varians kesiapan ASN digital*. Nilai tersebut termasuk kategori moderat dan menunjukkan daya jelaskan model yang cukup kuat dalam konteks penelitian perilaku organisasi sektor publik.

Hasil pengujian hipotesis ditampilkan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Jalur	$\beta$	T-Stat	P-Value	Keputusan
H1	LD → KA	0,346	4,579	0,000	Diterima
H2	LD → TA	0,667	17,043	0,000	Diterima
H3	TA → KA	0,423	5,315	0,000	Diterima
H4	LD → TA → KA	0,282	4,877	0,000	Diterima

Seluruh hipotesis didukung secara statistik ( $p < 0,05$ ). Koefisien jalur terbesar terdapat pada hubungan literasi digital terhadap *technology acceptance* ( $\beta = 0,667$ ), yang menunjukkan bahwa kompetensi digital merupakan determinan utama penerimaan teknologi. Total *effect* literasi digital terhadap kesiapan ASN digital sebesar 0,628 ( $0,346 + 0,282$ ), yang mengindikasikan kontribusi substantif literasi digital terhadap pembentukan kesiapan ASN digital.

#### **Pembahasan**

Literasi digital berpengaruh positif terhadap kesiapan ASN digital ( $\beta = 0,346$ ). Secara mekanistik, hal ini terjadi karena kompetensi digital yang terbentuk melalui dimensi *DigComp*, yaitu pengelolaan informasi, komunikasi digital, keamanan data, dan pemecahan masalah, membekali individu dengan skema kognitif yang relevan untuk menghadapi tuntutan pekerjaan berbasis teknologi. Dalam kerangka *Social Cognitive Theory* (Bandura, 1986), penguasaan kompetensi teknis meningkatkan *self-efficacy individu*, yang selanjutnya mendorong orientasi goal-setting terhadap lingkungan kerja digital. Implikasi terhadap teori administrasi publik adalah bahwa kesiapan ASN digital tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui variabel struktural seperti kematangan sistem atau regulasi. Variabel kompetensi individu bekerja sebagai kapasitas absorptif yang menentukan sejauh mana kebijakan transformasi digital diterjemahkan menjadi perilaku kerja nyata.

Pengaruh literasi digital terhadap *technology acceptance* sangat kuat ( $\beta = 0,667$ ). Mekanisme yang menjelaskan besarnya koefisien ini berakar pada konsep *cognitive load reduction*. Individu dengan literasi digital tinggi memiliki skema mental yang lebih terorganisasi terhadap antarmuka teknologi, sehingga beban kognitif dalam menginterpretasi sistem baru berkurang secara signifikan. Berkurangnya beban kognitif ini secara langsung meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), yang merupakan konstruk inti TAM. Temuan ini mempertegas bahwa TAM, yang awalnya dikembangkan Davis (1989) dalam konteks sistem informasi korporasi, memiliki validitas lintas konteks termasuk sektor publik, namun dengan

catatan penting: anteseden penerimaan teknologi di sektor publik lebih bersifat kompetensial daripada motivasional. Ini merupakan perluasan empiris TAM yang belum banyak diuji dalam literatur administrasi publik.

*Technology acceptance* berpengaruh signifikan terhadap kesiapan ASN digital ( $\beta = 0,423$ ). Secara mekanistik, sikap positif terhadap teknologi membentuk intensi perilaku yang dalam konteks kerja birokrasi digital diterjemahkan sebagai kesediaan untuk mengoperasikan SPBE, beradaptasi dengan pembaruan sistem, dan menginternalisasi etika digital. Temuan ini memiliki implikasi terhadap teori perubahan organisasi sektor publik. Literatur New Public Management (NPM) selama ini menempatkan reformasi digital sebagai *proses top-down* berbasis regulasi dan insentif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan teknologi pada level individu adalah variabel antara yang menentukan apakah kebijakan transformasi digital benar-benar terinternalisasi dalam perilaku aparatur, bukan sekadar dipatuhi secara prosedural.

Peran mediasi parsial *technology acceptance* mengonfirmasi bahwa literasi digital bekerja melalui dua jalur secara bersamaan. Jalur langsung mencerminkan transfer kompetensi ke kesiapan kerja. Jalur tidak langsung mencerminkan proses pembentukan sikap sebagai mediator psikologis. Secara teoritis, pola mediasi parsial ini konsisten dengan argumen Zhao, Lynch, dan Chen (2010) tentang *complementary mediation*, di mana kedua jalur beroperasi searah dan saling memperkuat. Implikasi teoritis yang lebih dalam adalah bahwa model kesiapan digital di sektor publik memerlukan dua level penjelasan secara simultan: level kompetensi (apa yang individu mampu lakukan) dan level atitudinal (bagaimana individu memandang teknologi). Tanpa memasukkan level atitudinal, model prediksi kesiapan ASN digital akan *underestimate* kontribusi nyata literasi digital. Ini menjadi argumen empiris untuk mengintegrasikan TAM ke dalam kerangka *workforce development* di sektor publik, suatu arah yang belum banyak dieksplor dalam literatur SPBE Indonesia.

Dari perspektif praktis, hasil penelitian mengindikasikan bahwa penguatan kurikulum administrasi publik perlu dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga untuk membentuk persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem digital pemerintahan. Integrasi pembelajaran berbasis praktik sistem digital pemerintahan dapat memperkuat kesiapan lulusan dalam menghadapi transformasi digital birokrasi.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital merupakan determinan utama kesiapan ASN digital, baik secara langsung maupun melalui mediasi *technology acceptance*. Temuan ini menegaskan bahwa kesiapan aparatur dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan tidak hanya bergantung pada penguasaan teknis teknologi, tetapi juga pada pembentukan persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem digital. Dengan demikian, kesiapan ASN digital dapat dipahami sebagai konstruksi yang bersifat kompetensial sekaligus psikologis. Secara mekanistik, literasi digital bekerja melalui pembentukan skema kognitif yang mengurangi beban interpretasi terhadap teknologi baru, sementara *technology acceptance* bekerja sebagai jembatan atitudinal yang mengonversi kompetensi menjadi kesiapan perilaku kerja.

Koefisien jalur terbesar pada hubungan literasi digital terhadap *technology acceptance* memperlihatkan bahwa kompetensi digital menjadi fondasi pembentukan sikap terhadap teknologi. Justifikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa model kesiapan digital di sektor publik tidak dapat semata-mata dijelaskan melalui pendekatan struktural atau kelembagaan, sebagaimana banyak dibahas dalam literatur digital *government maturity*. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme kognitif-perilaku individu berperan signifikan dalam menentukan kesiapan digital aparatur.

Peran mediasi parsial *technology acceptance* memperkuat argumentasi bahwa literasi digital bekerja melalui dua jalur: peningkatan kemampuan langsung dan pembentukan persepsi positif terhadap teknologi. Artinya, intervensi peningkatan literasi digital akan lebih efektif apabila dirancang secara simultan untuk membangun pengalaman penggunaan teknologi yang bermakna. Justifikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya pendekatan kurikulum yang tidak hanya berbasis keterampilan teknis, tetapi juga berbasis *experiential learning* dalam sistem pemerintahan digital.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan *Digital Competence Framework* dan *Technology Acceptance Model* dalam konteks sektor publik, sehingga memperluas penerapan TAM yang selama ini lebih dominan pada sektor swasta dan pendidikan. Model empiris yang diuji menunjukkan bahwa pendekatan perilaku teknologi relevan untuk menjelaskan kesiapan aparatur dalam birokrasi digital.

Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan sampel yang terbatas pada satu institusi pendidikan, sehingga validitas eksternal masih perlu diperluas. Penelitian selanjutnya disarankan menguji model pada ASN aktif atau lintas institusi serta

menambahkan variabel kontekstual seperti dukungan organisasi dan pengalaman penggunaan sistem pemerintahan digital untuk meningkatkan daya prediktif model.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab Hamid, M. R., Sami, W., & Sidek, M. M. (2017). *Discriminant validity assessment: Use of Fornell & Larcker criterion versus HTMT criterion*. *Journal of Physics: Conference Series*, 890(1), 012163. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/890/1/012163>
- Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). *Collaborative governance sistem pemerintahan berbasis elektronik: Best practice dari pemerintah daerah di Indonesia*. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(1), 52–74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>
- Antonietti, C., Cattaneo, A., & Amenduni, F. (2022). *Can teachers' digital competence influence technology acceptance in vocational education?* *Computers in Human Behavior*, 132, 107266. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107266>
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). *When to use and how to report the results of PLS-SEM*. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Khan, N., Sarwar, A., Chen, T. B., & Khan, S. (2022). *Connecting digital literacy in higher education to the 21st century workforce*. *Knowledge Management & E-Learning*, 14(1), 46–61. <https://doi.org/10.34105/j.kmel.2022.14.004>
- Khoza, T. K., Mabitsela, T., & Nel, P. (2024). *Technology readiness, technology acceptance, and work engagement: A mediational analysis*. *SA Journal of Industrial Psychology*, 50, 2131. <https://doi.org/10.4102/sajip.v50i0.2131>
- Mohd Dzin, N. H., & Lay, Y. F. (2021). *Validity and reliability of adapted self-efficacy scales in Malaysian context using PLS-SEM approach*. *Education Sciences*, 11(11), 676. <https://doi.org/10.3390/educsci11110676>
- OECD. (2024). *2023 OECD Digital Government Index: Results and key findings*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1a89ed5e-en>

- Potgieter, I. L., Coetzee, M., & Ferreira, N. (2023). *University students' digital world of work readiness in relation to their employability competency. Journal of Learning Development in Higher Education*, (27). <https://doi.org/10.47408/jldhe.vi27.922>
- Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J. H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). *Predictive model assessment in PLS-SEM using PLSpredict. European Journal of Marketing*, 53(11), 2322–2347. <https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189>
- Silitonga, M. S. (2023). The public sector's digital skills gap in Indonesia: The challenges and opportunities. *Jurnal Good Governance*, 19(1), 70–79. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i1.585>
- UNDP. (2022). *Digital public workforce capability framework*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/publications/digital-public-workforce-capability-framework> (undp.org in Bing)
- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens—With new examples of knowledge, skills and attitudes*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/115376>
- Yang, J., & Lou, K. (2024). Exploring the nexus of self-efficacy in digital literacy and technology acceptance: Insights from L2 Chinese teachers. *Asia Pacific Journal of Education*. <https://doi.org/10.1080/02188791.2024.2336247>
- Zhao, X., Lynch, J. G., Jr., & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis. *Journal of Consumer Research*, 37(2), 197–206. <https://doi.org/10.1086/651257>